

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	4
1.1 CASCADING KINERJA	4
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD.	9
1.3 ISU- ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	13
1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA	18
1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022	20

BAB II

PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	21
2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023.....	36
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	Error! Bookmark not defined.
2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (LAMPIRAN).....	49

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1 CAPAIAN KINERJA	50
a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	50
b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Tahun Terakhir (2022 dan 2023).....	51
c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Disandingkan Tahun 2022 Dengan Target Akhir Tahun 2026).....	51
d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional IKU	52
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	52
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	Error! Bookmark not defined.
g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja (Mengapa Tidak Mencapai Target Di Hasilkan).....	82
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	84
BAB IV PENUTUP	100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenaanannya sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024. Sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Secara substantif, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disusun berdasarkan masukan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini diharapkan

dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan implementasi penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650211 199006 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 CASCADING KINERJA

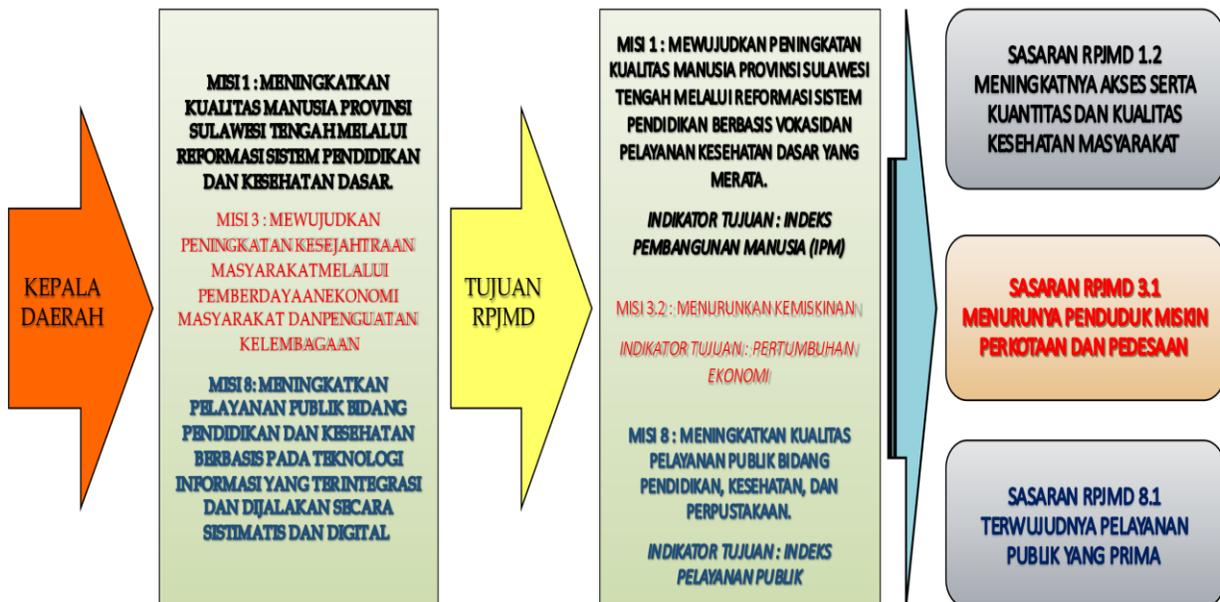
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 dan secara operasional mulai melaksanakan fungsi dan tugas pada awal tahun 2017.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pada Tahun 2023, maka perlu dibuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi capaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang baru terbentuk berupaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diupayakan beberapa pembenahan organisasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu pelaku Sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal tersebut didukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Konkuren) yang diharapkan dapat mewujudkan dan mengoptimalkan penanganan permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terdiri dari masalah angka fertilitas penduduk, pemakaian kontrasepsi, dan masalah Stunting. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban amanat undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana di jelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah Upaya mengatur Kelahiran Anak, Jarak dan Usia Ideal Melahirkan, Mengatur Kehamilan melalui Promosi, Perlindungan dan Bantuan sesuai dengan hak Reproduksi untuk Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna mengendalikan angka Kelahiran, Kematian serta Angka Stunting yang menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas dan fungsi didukung oleh sumber pembiayaan dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MISI RPJMD PROVINSI 2021- 2026



CASCADING

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kinerja Strategis Daerah menjadi tujuan dan sasaran RPJMD dan sasaran RPJMD	MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR.
	MISI 3 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAANEKONOMI MASYARAKAT DAN Penguatan KELEMBAGAAN
	MISI 8 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI DAN DIJALANKAN SECARA SISTEMATIS DAN DIGITAL
Tujuan RPJMD	MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS VOKASIDAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG MERATA. <i>INDIKATOR TUJUAN : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)</i>
	MISI 3.2 : MENURUNKAN KEMISKINAN <i>INDIKATOR TUJUAN : PERTUMBUHAN EKONOMI</i> MISI 8 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERPUSTAKAAN. <i>INDIKATOR TUJUAN : INDEKS PELAYANAN PUBLIK</i>
Indikator	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Sasaran RPJMD	SASARAN RPJMD 1.2 MENINGKATNYA AKSES SERTA KUANTITAS DAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT SASARAN RPJMD 3.1 MENURUNYA PENDUDUK MISKIN PERKOTAAN DAN PEDESAAN SASARAN RPJMD 8.1 TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Tujuan RENSTRA	MEWUJUDKAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI GUNA MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN, KEMATIAN SERTA ANGKA STUNTING
Indikator	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Sasaran RENSTRA	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA SERTA KETAHANAN KESEJAHTERAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Laj Kel Indikator Kinerja Utama	1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)



Mengendalikan Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan Penduduk 1,50

Menurunnya Angka Kelahiran Total

Total Fertility Rate 2,55

Program Pengendalian Penduduk

Jumlah Kabupaten/Nota yang menyusun GDPK

Jumlah Kabupaten/Nota yang menyusun GDPK 1 Dok

Kegiatan 1 : Kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk

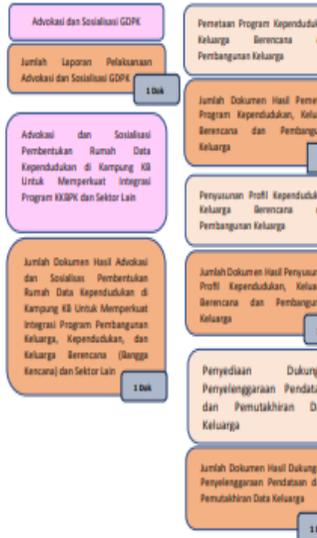
Jumlah Dokumen sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk 2 Dok

12 Sub Kegiatan

Kegiatan 2: Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 3 Dok

7 Sub Kegiatan



Meningkatkan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga 62,50

Meningkatnya kualitas Ketentraman keluarga

Indeks Ketentraman 55,71

Meningkatnya Kualitas Kemandirian Keluarga

Indeks Kemandirian 48,24

Meningkatnya Kualitas kebahagiaan keluarga

Indeks Kebahagiaan 62,5

Program Keluarga Berencana

Rasio Aseptor KB

Meningkatnya Jumlah Aseptor KB Aktif KB 63

Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Meningkatnya Jumlah peserta KB aktif Perempuan 15-40 thn 60

Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)

Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) 13,99

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19

Kegiatan 1 : Pengembangan Desain Program Pengendalian dan Pelaksanaan Adokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal.

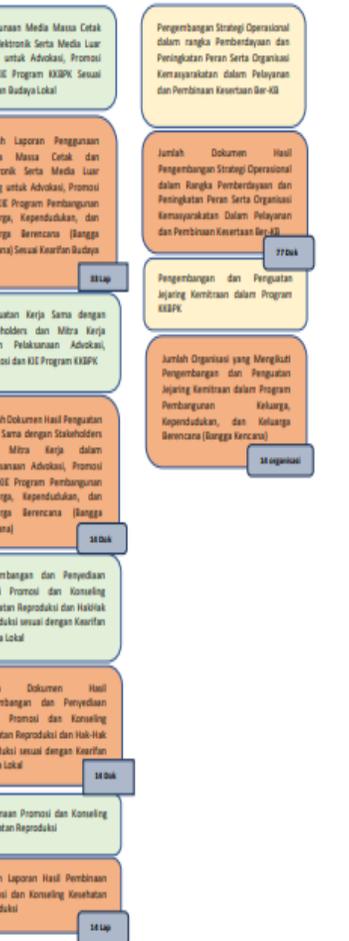
Jumlah Peserta Adokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal. 4 Dok

8 Sub Kegiatan

Kegiatan 2 : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam pengelolaan Pelayanan Kesetaraan Ber-KB

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pelayanan Kesetaraan Ber-KB 2 Dok

3 Sub Kegiatan



Program Keluarga Sejahtera

Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility Rate/ ASFR)

Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 36/1000

Kegiatan 1 : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 1 Dok

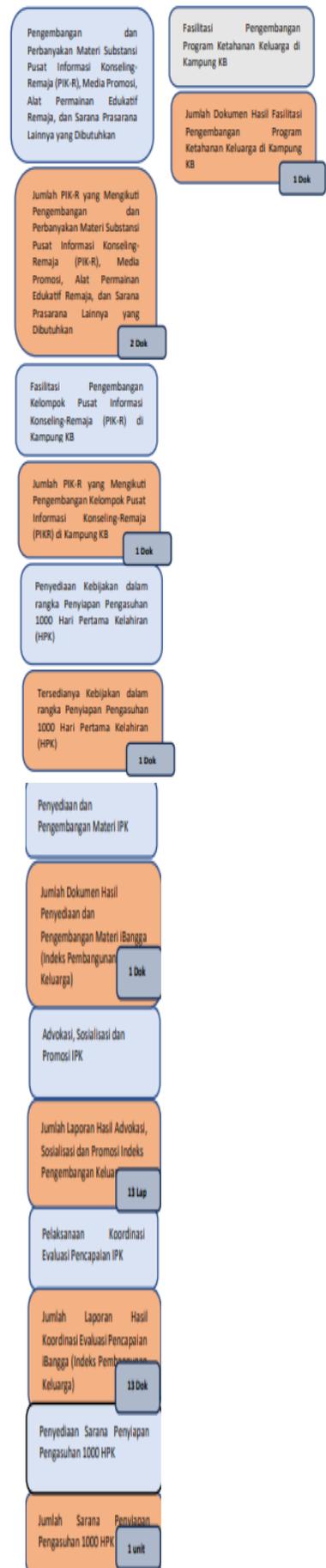
16 Sub Kegiatan

Kegiatan 2 : Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat bimbingan dan pelatihan Pemberdayaan ekonomi keluarga 20 Kelompok

5 Sub Kegiatan





1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah. OPD yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas “*membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga*”.

Sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut

Tugas pokok :

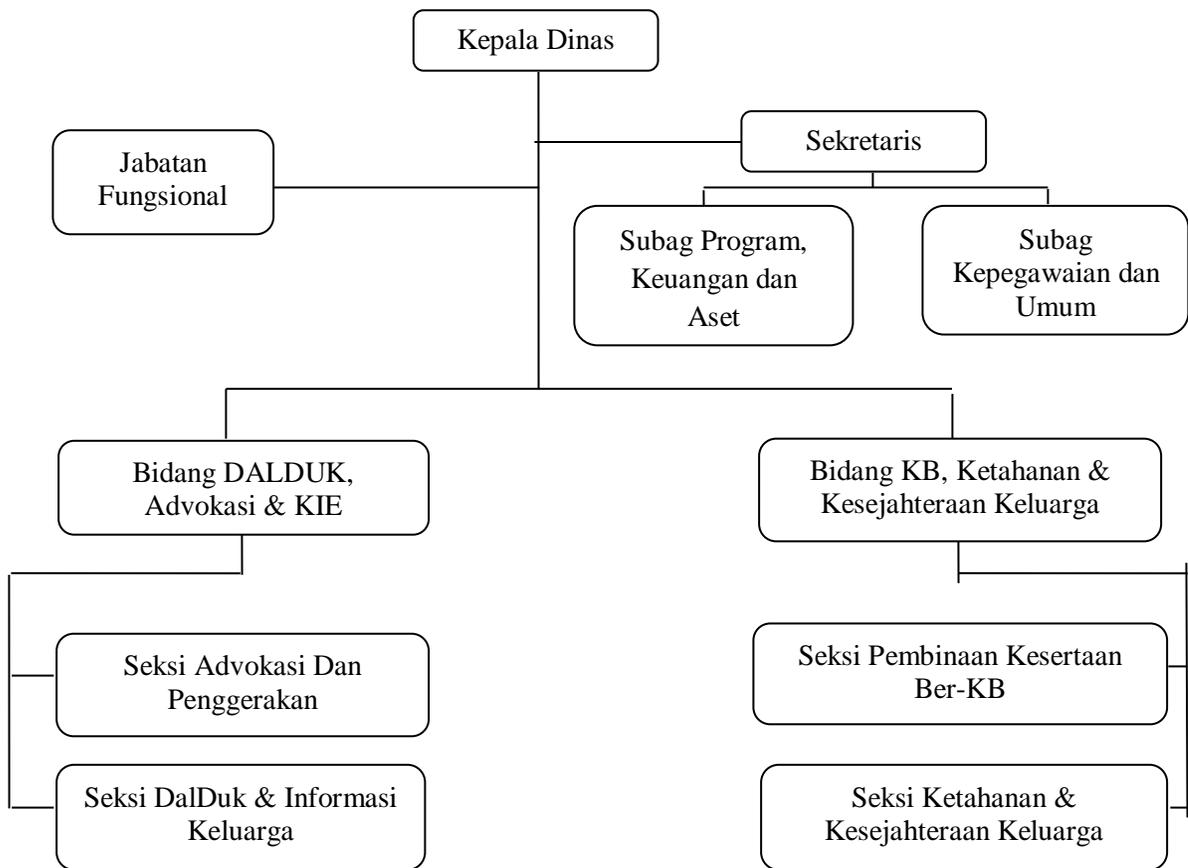
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan kebijakan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi fungsi perencanaan program dan penatausahaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta bagian data dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Penetapan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;

- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilingkungan kabupaten dan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Prov. Sulteng



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- ✚ Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- ✚ Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- ✚ Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Masing – masing.

Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1.2 Sekretariat

Tugas:

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub bagian:

a. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

b. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Tugas:

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk,

Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibantu oleh 2 (dua) Seksi :

a. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.

b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

a.1 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;

- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 2 (dua) Seksi:

a. Seksi Pembinaan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber – KB.

b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan keluarga.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Isu Strategis.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 1 (Satu) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap program OPD, sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam Rencana Program jangka menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

1. Bonus demografi; adalah Populasi Penduduk yang Produktif jauh lebih banyak ketimbang Penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi ini berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Indonesia. Dan Stunting merupakan ancaman yang serius terhadap bonus Demografi yang saat ini di rasakan Indonesia. Generasi yang Stunting bisa lahir apabila banyak yang kawin pada Usia Muda, Putus Sekolah, Mempunyai anak Banyak ,kemudian jarak kelahiran yang dekat, dan kematian ibu yang tinggi. Dari hasil survei status Giji Tahun 2022 bahwa angka Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat tinggi yaitu 29,7% dan berada di urutan ke delapan tertinggi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan target yang ingin dicapai secara

Nasional sebesar 14% pada tahun 2024 dan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu sebesar 11%.

Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020- 2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah turun dari 2.71 (SDKI 2017) menjadi 2.61 (SKAP 2019).

2. *Aging population*; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*Aging Population*) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan Perhatian dan intervensi yang tepat;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga; kebijakan Pembangunan Manusia Dilakukan Berdasarkan Pendekatan Siklus Hidup Dan Inklusif, Termasuk Memperhatikan Kebutuhan Penduduk Usia Lanjut Maupun Penduduk Penyandang Disabilitas. Narasi Ini, Bahkan Akan Lebih Komprehensif Apabila Dimulai Dari Gagasan Perencanaan Dari Tahap Pra Berkeluarga (Perencanaan Kehidupan Berkeluarga),
4. Merencanakan Keinginan Untuk Memiliki Anak Termasuk Jumlah Anak Yang Dikehendaki, Proses Kehamilan Yang Merupakan Fase Yang Juga Penting Dalam Proses Tumbuh Kembang Anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Periode Yang Dimulai Sejak Terbentuknya Janin Dalam Kandungan Hingga Anak Berusia 2 Tahun), Pendidikan Anak Usia Dini (Pra Sekolah) Sampai Dengan Usia Sekolah, Remaja Dengan Berbagai Pendekatannya Dalam Penyiapan Generasi Bangsa Yang Berkualitas Menuju Usia Produktif/Bekerja Serta Perhatian Terhadap Kelanjutusiaan Seluruh Tahapan Kehidupan);

5. Satu Data Kependudukan; Pemerintah Telah Menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia Adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Untuk Menghasilkan Data Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Kebenarannya. Disatu Sisi, Pendataan Keluarga (PK) Yang Menjadi Tugas Dan Kewenangan BKKBN, Harus Dapat Diintegrasikan Dengan Data Sektor Lain, Seperti Sensus Penduduk (SP), Serta Data Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil), Sehingga Dapat Terwujud Satu Data Yang Lengkap Baik Guna Mendukung Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Nasional, Maupun Untuk Mendukung Operasionalisasi Program/Kegiatan Bangsa Kencana Di Lini Lapangan
6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), belum dipahaminya oleh masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, masih tingginya jumlah anak yang dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksi sekitar 3 sampai 4 anak, pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi cukup tinggi tapi tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB, Angka Spesifik Fertility Rate (ASFR) yang masih cukup tinggi, masih rendahnya cakupan KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
7. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4 persen (SKAP 2019). Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda, adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangsa Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
8. Rendahnya pemahaman Remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai

proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

9. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (*unmet need*) di Indonesia Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (*unmet need*) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, unmet need terus mengalami kenaikan yakni pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 9,9 persen (SKAP 2018) menjadi 12,7 persen pada tahun 2019 (SKAP 2019).
10. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan Di Sulawesi Tengah, angka prevalensi stunting dimuat dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dalam bentuk persentase dengan target 11,65 persen dan hanya tercapai 9,87 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi

perubahan indikator menjadi jumlah keluarga, dengan target 27.927 keluarga dan tercapai 100%.

11. Meningkatnya Angka Pernikahan Dini yang Secara Nasional menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Daerah Penyumbang angka pernikahan anak di Indonesia. Pernikahan Dini tersebut sangat berdampak terhadap angka kematian ibu, angka kematian anak, angka putus sekolah, angka kekerasan pada perempuan serta dampak sosial lainnya.

1.3.2 Permasalahan Utama

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru mempunyai tantangan dan permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah bagaimana meningkatkan akses, kuantitas dan kualitas pelayanan KB dan kependudukan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Tantangan Internal

- Hasil evaluasi Permendagri No 86 Tahun 2017: Terdapat 18 Indikator yang tidak tercapai atau sekitar (58 %) dan 10 indikator yang tidak tersedia datanya sekitar (32 %)
- Laju pertumbuhan penduduk (2.1) di atas rata-rata nasional
- Angka kelahiran pada perempuan yang masih cukup tinggi (2,7) diatas nasional (2,2).
- Angka cakupan kesertaan ber KB masih rendah (76,50%)
- Angka capaian MKJP rata-rata 17,16% dari target 20,77%
- Angka *unmet need* pada tahun 2021 mencapai 11,96 % dari target 8,6%
- Angka pernikahan anak yang cukup tinggi ke 5 nasional (48%)
- Angka kelahiran pada remaja yang tinggi & semakin meningkat ke 4 nasional (51%)
- Indeks Pembangunan yang rendah pada capaian 52,4 %
- Advokasi, kampanye tentang kependudukan, KB & ketahanan keluarga masih sangat terbatas
- Kelembagaan pengendalian penduduk & KB di daerah yang tidak seragam/bervariasi (6 kab dengan OPD P2KB)
- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaran program di semua tingkatan
- Grand Desain Pembangunan Kependudukan belum menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan perencanaan berwawasan kependudukan.
- Rasio petugas keluarga berencana di daerah yang belum sesuai yang diharapkan hanya (1: 5) seharusnya (1:2) artinya 1 petugas melayani 2 desa.
- Keberadaan kelompok BKB, BKR, BKL & UPPKS di tingkat desa yang tidak maksimal
- Penganggaran Program Pengendalian Penduduk dan KB hanya bersumber dari APBD Provinsi

b. Tantangan Eksternal

- Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk yang berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata;
- Adanya rentang kendali manajemen pelayanan pengendalian penduduk dan KB antara Provinsi dengan Kabupaten Kota akibat dari struktur kelembagaan Provinsi dan kabupaten/Kota yang tidak seragam serta masih adanya tugas dan kewenangan oleh pusat masih dilaksanakan oleh perwakilan bkkbn sebagai perwakilan pusat yang belum diserahkan ke pemerintah Provinsi.
- Belum adanya Akses dan Kualitas Penyelenggaraan KBKR yang Komprehensif berbasis kewilayaan dan Focus pada Segmentasi Sasaran.
- Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis pengendalian penduduk Organisasi perangkat Daerah lainnya
- Masih kurangnya Pemahaman tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif sesuai Siklus Hidup, serta menguatkan Pembentukan Karakter di Keluarga.
- Belum adanya sarana dan prasarana dalam hal peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program KKBPK sesuai dengan Karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
- Belum maksimalnya pemahaman remaja dan masyarakat untuk berperan dalam intensitas generasi berencana yang berbasis komunitas (*Genre to community*).
- Belum adanya Pemaduan dan Sinkronisasi tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- Adanya pemahaman dimasyarakat bahwa KB dan Kespro adalah urusan perempuan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- Semakin meningkatnya perilaku seks bebas dikalangan remaja

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya

manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai. Adapun sumberdaya aparatur dan sumberdaya asset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebagai berikut:

Jumlah personil Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember sebanyak 62 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 6 Orang Pejabat Fungsional 4 Orang dan tenaga kontrak 36 Orang.

Tabel 1.4.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Pendidikan	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	S3	-	-	-	1	1
2.	S2	-	1	2	1	4
3.	S1/D.IV	-	-	-	1	1
4.	D.I-DIII	-	-	-	-	-
5	SMA/SMK	-	-	-	-	-
Total		0	1	2	3	6

Tabel 4.4. Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Golru	Pria	%	Wanita	%
1.	Golru I/a	-	-	-	-
2.	Golru I/b	-	-	-	-
3.	Golru I/c	-	-	-	-
4.	Golru I/d	1	2%	-	-
5.	Golru II/a	-	-	-	-
6.	Golru II/b	-	-	-	-
7.	Golru II/c	1	2%	1	2%
8.	Golru II/d	-	-	1	2%
9.	Golru III/a	-	-	5	9%
10.	Golru III/b	2	3%	15	26%
11.	Golru III/c	2	3%	11	19 %
12.	Golru IV/a	-	-	4	7%
13.	Golru IV/b	1	2%	-	-
14.	Golru IV/c	1	2%	-	-
15.	Golru IV/d	-	-	1	2%
16	Tenaga Kontrak	19	-	20	-
Jumlah		27	14	58	67

Tabel 2.3. Klasifikasi Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	-	1 Orang	1 Orang
2.	Eselon III	2 Orang	1 Orang	3 Orang
3.	Eselon IV	-	2 Orang	2 Orang
4.	Staf	9 Orang	42 Orang	50 Orang
Jumlah		11 Orang	46 Orang	58 Orang

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut atas Permasalahan Yang Ada
1.	<p>Pengukuran Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk Pengukuran Kinerja, Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit masih kosong. ➤ Untuk Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan masih kurang. <p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akan mengkoordinasikan ke Inspektorat untuk menanyakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Pengukuran Kinerja. ➤ Akan mengkoordinasikan ke Inspektorat untuk menanyakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Pengukuran Kinerja.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akan mengkoordinasikan ke Inspektorat untuk menanyakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan para pelaku pembangunan, Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Perencanaan pembangunan daerah akan dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat sehingga terdapat adanya keterpaduan antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan mencerminkan apa yang ingin dicapai, dalam memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk mewujudkan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yakni “*Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju* “.memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Kependudukan yang memberi jawaban bagi masyarakat Sulawesi Tengah

dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian menunjukkan bahwa Pembangunan Kependudukan di Sulawesi Tengah harus mendorong Kuantitas dan Kualitas Masyarakatnya dengan modal penduduk yang berkualitas akan memacu Sulawesi Tengah semakin Sejahtera dan maju yaitu mencapai kondisi yang lebih baik yaitu memiliki keunggulan, baik itu keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Lebih Maju adalah Secara Umum ***Gerak cepat*** dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. ***Lebih Sejahtera*** dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, social serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman. ***Lebih Maju*** adalah Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, social maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai Visi maka di Jabarkan ke dalam 9 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu;

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital.

9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian visi, dan Misi dan di dukung dengan program prioritas yaitu:

- a. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud *cash for work* berbasis pada Korban Bencana maupun *cash for work* di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi seperti Kasimbar-Tambu, Tayawa-Kolonodale, Mensung-Pasir Putih, Balingara-Toili Barat, Sigi-Poso, Mamosalato-Toili.
- b. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
- c. Menyediaan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;
- d. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.

Dilihat dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat terkait dengan misi ke 1, 3 dan 8. Dimana

- ❖ **Misi 1:** *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.*
- ❖ **Tujuan:** *Mewujudkan kualitas dan kuantitas melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi guna mengendalikan angka kelahiran, kematian serta angka stunting.*
- ❖ **Sasaran:** *Terlaksananya program pengendalian penduduk serta penyelenggaraan Keluarga Berencana.*
- ❖ **Misi 3:** *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.*
- ❖ **Tujuan:** *Mewujudkan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.*
- ❖ **Sasaran:** *Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga*
- ❖ **Misi 8:** *Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Infomasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan Digital.*
- ❖ **Tujuan:** *Terwujudnya pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.*
- ❖ **Sasaran:** *Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.*

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dalam Periode RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam mendukung program pembangunan. Hasil yang diharapkan adalah Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan keluarga.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tujuan untuk : Meningkatkan kualitas manusia provinsi Sulawesi tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan.

1. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna mengendalikan angka Kelahiran, Kematian serta Angka Stunting.
2. Mewujudkan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

b. Sasaran.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) kedepan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk Serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
2. Meningkatnya Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR)	Lintas Sektor , Lintas Progra,Lurah Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh.Agama, Tokoh,Adat, PUS Swasta	Jumlah lintas sector,lintas program, lurah organisasi kemasyarakatan , tokoh agama tokoh adat PUS, Swasta yang mendapat informasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi	40 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
2	Meningkatkan Penggunaan MKJP		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti seminar KB dan Kespro	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
3	Menurunkan Unmeed Need		Jumlah Sarana Penunjang / Materi / Spot Radio yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan , KB dan Pembangunan Keluarga.	1 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
4	Menurunkan Presentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian Kontrasepsi		Jumlah Media Cetak / Media Elektronik yang digunakan untuk Advokasi , Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.			2 Media	2 Media	2 Media	2 Media
5	Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi Pasca Persalinan		Jumlah Mitra Kerja yang terlibat dalam Advokasi dan KIE Bangga Kencana			10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra
			Jumlah Mitra Kerja yang bekerjasama dalam Program KB dan Kesehatan		10 Mitra				

			Reproduksi Remaja						
			Jumlah Sarana Promosi dan Konseling Kespro yang tersedia sesuai dengan Kearifan			2 Sarana	2 Sarana	2 Sarana	2 Sarana
			Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-hak Reproduksi yang tersedia sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal			2 Materi	2 Materi	2 Materi	2 Materi
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dibangun dalam hal KB dan Kesehatan Reproduksi			13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota

PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulteng	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Kelompok Remaja, Genre, PIK-R	Rp. 211.144.850	Remaja Peduli Stunting dan Pernikahan Anak	25 Kelompok (250 Orang)
		Tim TPPS, Pendamping Keluarga, Kelompok Tribina	Rp. 41.586.000	Focus Group Discussion Pernikahan Anak dan Stunting Kab. Buol	5 Kelompok (50 Orang)
		Kelompok Remaja, Kader Tribina, Tim Pendamping Keluarga	Rp. 47.889.500	Workshop Cegah Nikah Dini dan Stunting Kab. Morowali	5 Kelompok (50 Orang)
		Kelompok Remaja, Kader Tribina, Tim Pendamping Keluarga	Rp. 42.944.500	Workshop Cegah Nikah Dini dan Stunting Kab. Morowali Utara	5 Kelompok (50 Orang)
		Kelompok Remaja, Kader Tribina, Tim Pendamping Keluarga	Rp. 32.363.700	Workshop Cegah Nikah Dini dan Stunting Kab. Sigi	5 Kelompok (50 Orang)
		Kelompok PIK-R	Rp. 32.993.200	Sosialisasi dan Konseling PIK-R di Sekolah SMA/SMk kota Palu	5 Kelompok (150 Orang)
		Kelompok Tribina, Kader		Mini Loka Karya Pengasuhan	

8	Tribina, Tim Pendamping Keluarga	Rp. 33.774.700	1000 HPK Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Donggala	1 Kelompok (50 Orang)
	Kelompok Tribina, Kader Tribina, Tim Pendamping Keluarga	Rp. 45.447.800	Mini Loka Karya Pengasuhan 1000 HPK Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Toli-toli	1 Kelompok (50 Orang)
9	Kelompok UPPKS, Kader Tribina, Tim Pendamping Keluarga Stunting	Rp. 82.690.200	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di daerah kemiskinan/lokus stunting Kota Palu	10 Kelompok (130 Orang)
10	Kelompok UPPKS, Kader		Pemberdayaan ekonomi	

		Tribina, Tim Pendamping Keluarga Stunting	Rp. 57.858.100	keluarga (UPPKA) keruarga risiko stunting Kab. Tolitoli	1 Kelompok (55 Orang)
11		Kelompok UPPKS, Kader Tribina, Kelompok Tribina, Tim Pendamping Keluarga Stunting, PIK-R	Rp. 83.443.050	Peningkatan kapasitas mitra organisasi kemasyarakatan untuk Tribina, Uppks dan pendamping keluarga untuk percepatan penurunan stunting di Kab.Parigi Moutong	5 Kelompok (125 Orang)
12		Kelompok Tribina, Kader BKB, Tim Pendamping Keluarga Stunting	Rp. 111.804.300	Pembinaan Prefreshing Pengelola Bina Keluarga Balita Kab. Parigi Moutong	5 Kelompok (200 Orang)
13		Kelompok Tribina, Kader BKR, PIK-R	Rp. 45.435.000	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Percepatan Penurunan Stunting Kab. Tolitoli	1 Kelompok (50 Orang)

14		Kelompok Lansia. Pengelola BKL	Rp. 27.300.750	Workshop Ketahanan keluarga lansia	5 Kelompok (50 Orang)
15		Kelompok Remaja, Genre, Siswa/Siswi SMP, Tim Percepatan Penurunan Stunting	Rp. 150.000.000	Remaja Peduli Stunting dan Pernikahan Anak	1 Kelompok (180 Orang)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

No			Jumlah Dana	Keterangan	Jumlah Kelompok
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulteng	KIE KB	Rp. 23.567.150	Sosialisasi KIE KB dan Kespro dalam Percepatan Penurunan Stunting di Sigi	3 Kelompok (40 Orang)
17		Organisasi Masyarakat dalam KB	Rp. 26.437.350	Organisasi Masyarakat dalam KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Sigi	4 Kelompok (50 Orang)

18		Organisasi Masyarakat dalam KB	Rp. 37.042.350	Organisasi Masyarakat dalam KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Morowali Utara	4 Kelompok (50 Orang)
19		Jejaring Kemitraan KB	Rp. 42.171.950	Jejaring Kemitraan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting di Banggai Laut	4 Kelompok (40 Orang)
20		Jejaring Kemitraan KB	Rp. 37.621.950	Jejaring Kemitraan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting di Banggai Kepulauan	4 Kelompok (40 Orang)
21		Jejaring Kemitraan KB	Rp. 25.512.300	Jejaring Kemitraan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting di Palu	4 Kelompok (40 Orang)
22		Workshop KB	Rp. 38.004.000	Workshop KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Banggai Kepulauan	4 Kelompok (40 Orang)
23		Workshop KB	Rp. 38.863.650	Workshop KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Banggai Kepulauan	4 Kelompok (40 Orang)

24		Program Pengendalian Penduduk		
	FGD Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kab. Donggala	Rp. 19.025.000	Sosialisasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Kelompok 25 Orang
25	FGD Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kab. Morowali Utara	Rp. 31.805.000	Sosialisasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Kelompok 25 Orang

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Advokasi

Keberhasilan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja dan kontribusi positif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta peran aktif dari segenap komponen organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka harus diupayakan masuknya wawasan kependudukan dan keluarga berencana sebagai asas pembangunan di daerah/kabupaten/kota maupun di Organisasi Perangkat Daerah serta institusi satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera disemua golongan masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan peningkatan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Peran masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan KB saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kependudukan dan keluarga berencana hanya dapat diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (termasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara maupun pelaku serta terlibat aktif pada pembangunan kependudukan dan KB. Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif dalam pengembangan Upaya pengelolaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia serta kelompok-kelompok yang mendukung keluarga berencana di desa/kelurahan seperti pengembangan Posyandu, Posbindu, dasa wisma maupun kegiatan lainnya. Untuk itu perlu upaya peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan kualitas tenaga lapangan dan kader dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

3. *Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kependudukan dan KB dengan pengutamaan pada upaya Komunikasi Informasi dan Edukatif.*

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana harus mampu menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan sarana prasarana maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas masalah kuantitas dan kualitas kependudukan dan keluarga berencana dapat dikurangi. Untuk itu perlu peningkatan kualitas alat, obat dan sarana pelayanan serta jaminan pembiayaan dengan mendorong masyarakat untuk mengikuti program Jaminan Sosial Nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor terutama dengan sektor kesehatan dan BPJS.

Untuk mendorong masyarakat proaktif dalam mengikuti program kependudukan dan keluarga berencana dibutuhkan penguatan komunikasi, informasi dan edukasi melalui peningkatan kerjasama dengan sektor terkait serta kelembagaan yang ada di daerah. Upaya KIE dilakukan dengan berbagai cara antara lain penyebar luasan informasi dengan memanfaatkan berbagai media maupun sarana lainnya dengan memperhatikan karakteristik, budaya dan ekonomi setiap daerah.

4. *Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan Keluarga Berencana.*

Penyelenggaraan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terdistribusi secara merata dilapangan. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kependudukan dan KB

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga pelayanan publik di daerah. Adapun program-program tersebut terdiri dari 4 (Empat) program sebagai berikut: mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.3

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Fisik terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
1	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk serta Penyelenggaraan Keluarga	1. Program Pengendalian Penduduk	825.588.400	1.195.602.550	370.014.150 (+)
a.Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		363.508.900	562.811.800	199.302.900 (+)	
- Advokasi dan Sosialisasi GDPK		203.766.600	345.517.600	141.751.000 (+)	
- Advokasi dan sosialisasi Pembentukan rumah data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK dan Sektor lain		159.742.300	217.294.200	57.551.900 (+)	
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah		462.079.500	632.790.750	170.711.250 (+)	

		Provinsi			
		- Pemetaan Program Kependudukan, keluarga berencana, dan Pembangunan keluarga	245.000.000	238.000.000	7.000.000 (-)
		- Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana, dan Pembangunan keluarga	119.890.000	299.051.250	179.161.250 (+)
		- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	-	95.739.500	95.739.500 (+)
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	800.038.350	1.029.056.300	229.017.950 (+)
		1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Kominikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	444.212.750	541.266.900	97.054.150 (+)

		- Penggunaan media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	78.017.150	115.281.850	37.264.700 (+)
		- Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	110.501.050	137.849.150	27.348.100 (+)
		- Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	162.472.700	158.297.700	4.175.000 (-)
		- Pembinaan promosi dan konseling Kesehatan reproduksi	93.221.850	129.838.200	36.616.350 (+)
		2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam	355.825.600	487.789.400	131.963.800 (+)

		<p>Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	<p>231.642.950</p> <p>124.200.650</p>	<p>299.519.750</p> <p>188.269.650</p>	<p>67.876.800 (+)</p> <p>312.470.300 (+)</p>
		<p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan</p>	<p>1.586.661.600</p> <p>1.199.556.500</p>	<p>2.078.568.800</p> <p>1.592.996.400</p>	<p>491.907.200 (+)</p> <p>393.439.900 (+)</p>

		Keluarga			
		- Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	114.265.000	175.796.000	61.531.000 (+)
		- Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	211.144.850	211.744.850	600.000 (+)
		- Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	87.500.000	279.086.000	191.586.000 (+)
		- Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	128.552.700	156.765.900	28.213.200 (+)
		- Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Inforamsi dan Konseling Remaja (PIK/ R)	51.912.350	48.512.350	3.400.000 (-)
		- Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1000 hari pertama kelahiran (HPK)	51.699.800	78.822.500	27.122.700 (+)
		- Penyerasian kebijakan dalam	49.521.800	48.621.800	900.000 (-)

		pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK			
		- Penyediaan dan pengembangan materi IPK	50.730.000	41.190.000	9.540.000 (-)
		- Advokasi, sosialisasi, dan promosi IPK	57.170.150	55.370.050	1.800.100 (-)
		- Pelaksanaan fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	48.539.950	48.539.950	48.539.950 (Tetap)
		- Penyediaan sarana penyiapan pengasuhan 1000 HPK	348.550.000	448.547.000	99.997.000 (+)
		2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	387.105.000	485.572.400	98.467.400 (+)
		- Sub. Kegiatan Pengelola Ketahanan Keluarga melalui	132.700.200	88.520.200	84.180.000 (-)

		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PKKS)			
		- Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	69.408.100	81.868.100	12.460.000 (+)
		- Sub. Kegiatan sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	57.496.000	47.201.000	10.295.000 (-)
		- Sub. Kegiatan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	100.000.050	240.682.350	140.682.300 (+)
		- Sub. Kegiatan fasilitasi			

		pengembangan program ketahanan keluarga dikampung KB	27.500.750	27.300.750	200.000 (-)
--	--	--	------------	------------	-------------

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berkualitas (kuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- 29.965.650 1.916.900 14.999.850 3.000.000	10.594.896.362 29.965.650 1.916.900 14.999.850 3.000.000	14.417.415.002 (+) 29.965.650 (Tetap) 1.916.900 (Tetap) 14.999.850 (Tetap) 3.000.000 (Tetap)

		- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.048.900	10.048.900	10.048.900 (Tetap)
		2. Administrasi Keuangan			
		Perangkat Daerah			
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.367.184.712	6.835.293.139	468.108.427 (+)
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	906.060.000	919.550.000	13.490.000 (+)
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.300.000	45.000.000	1.700.000 (+)
		3. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	714.000.000	1.522.700.000	808.700.000 (+)
		- Sub. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	-	1.072.000.000	1.072.000.000 (+)
		- Sub. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas atau lapangan	-	450.700.000	450.700.000 (+)

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		4. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	303.870.000	396.090.000	92.220.000 (+)
		- Sub. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	276.000.000	321.300.000	45.300.000 (+)
		- Sub. Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	27.870.000	74.790.000	46.920.000 (+)
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.575.000	337.621.100	129.046.000 (+)
		- Sub. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	101.040.000	229.586.100	128.546.100 (+)
		- Sub. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	53.035.000	53.035.000	53.035.000 (Tetap)
		- Sub. Kegiatan bimbingan			

		teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54.500.000	55.000.000	500.000 (+)
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.511.862.245	3.685.619.608	2.173.757.363 (+)
		- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.430.595	670.814.594	603.383.999 (+)
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.520.000	1.117.962.564	921.442.564 (+)
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.211.496.900	78.646.600	1.132.850.300 (-)
			-	1.818.195.850	1.818.195.850 (Tetap)
		7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510.078.755	645.757.505	135.678.750 (+)
		- Sub. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	349.861.400	470.005.500	120.144.100 (+)
		- Sub. Kegiatan penyediaan jasa			

		pelayanan umum kantor	160.217.355	175.570.005	15.352.650 (+)
--	--	-----------------------	-------------	-------------	----------------

Tabel 2,4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berkualitas (kuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Reformasi Birokrasi	-		Sekretaris Dinas
		Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan metode, yaitu geometrik	BPS	Bidang Pengendalian Penduduk
		Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	iBANGGA atau Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang di tujukan melalui tiga dimensi yaitu: - Dimensi Ketentraman. - Dimensi Kemandirian - Dimensi Kebahagiaan Keluarga. hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan Pembangunan Keluarga di suatu wilayah yang diklarifikasi menjadi tangguh, berkembang dan rentan.	BKKBN	Bidang KBKS

2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (LAMPIRAN)

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	❖ Indeks Reformasi Perangkat Daerah	64
2.	Menurunkan Angka Kelahiran Total Total Fertility Rate (TFR)	❖ Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1,50
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Kualitas Ketentraman Keluarga ➢ Meningkatkan Kualitas Kemandirian Keluarga ➢ Meningkatkan Kualitas Kebahagiaan Keluarga 	❖ Meningkatkan Kualitas Keluarga	52,50

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 14.417.415.002	APBD
2. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.195.602.550	
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.029.056.300	
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.078.568.800	
T o t a l	Rp. 18.720.642.652	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian Penyelenggaraan Pembangunan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu *“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”*, maka peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana dan penanggungjawab terhadap pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk mendukung pencapaian target dan sasaran program dalam RPJMD 2021-2026 yaitu optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk pada tahun 2017 dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2022 sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja merupakan gambaran capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja antar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Gubernur Sulawesi Tengah dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai oleh Organisasi. Pengukuran tersebut akan menghasilkan apakah target tercapai atau tidak serta perlu dilakukan analisis mendalam atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Ket
1.	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	64	52.35	81.79	Belum tercapai
2.	Menurunnya angka kelahiran <i>total fertility rate</i> (TFR)	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.50	1.22	81.3	Capaian Melebihi Target
3.	Meningkatkan kualitas ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	Meningkatkan Kualitas Keluarga	52.50	59.09	112.5	Capaian Melebihi Target

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Tahun Terakhir (2022 dan 2023)

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	% capaian	Target (%)	Realisasi (%)	% capaian	Target (%)	Realisasi (%)	% capaian
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	63.05	-	-	64.50	-	-	64	52.35	-
2	Menurunnya angka kelahiran total fertility rate (TFR)	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	1.33	1.22	91.7	1.26	1.53	121	1.50	1,22	81,3
3	Meningkatkan kualitas ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52.47	51.49	98	54.38	51.09	93.9	52.50	59.09	112.5

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi)

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2023		Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	52.35	71	81.79
2	Menurunnya angka kelahiran total fertility rate (TFR)	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	1.50	1,22	1.30	93.8

3	Meningkatkan kualitas ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52.50	59.09	52.90	111.7
---	--	--	-------	-------	-------	-------

d. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional IKU

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi %	Target Akhir Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	52.35	-	-
2	Menurunnya angka kelahiran total fertility rate (TFR)	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	1,22	1.13	108
3	Meningkatkan kualitas ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59.09	61	111.7

e. Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada awal tahun 2021 telah ditetapkan 31 indikator yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) yang berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan terdapat 7 indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas P2KB. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran sebagai berikut :

- a) kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk yang berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

- b) kompetensi ASN DP2KB dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata;
- c) Adanya rentang kendali manajemen pelayanan pengendalian penduduk dan KB antara Provinsi dengan Kabupaten Kota akibat dari struktur kelembagaan Provinsi dan kabupaten/ Kota yang tidak seragam serta masih adanya tugas dan kewenangan oleh pusat masih dilaksanakan oleh perwakilan bkkbn sebagai perwakilan pusat yang belum diserahkan ke pemerintah Provinsi
- d) Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya tenaga pengendalian penduduk dan KB dilapangan, dimana saat ini rasio tenaga PLKB di Sulteng sebagai ujung tombak di lapangan di sekitar 1: 6 yang seharusnya 1: 2. Selain itu kompetensi dan kemampuan tenaga PPKBD dilapangan yang masih terbatas. Hal ini sangat mengganggu produktifitas sdm dalam meningkatkan capaian program dan Kegiatan. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Capaian Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - b. Tersedianya kelompok-kelompok fasilitator dalam program pembinaan;
 - c. Adanya regulasi tentang Pengendalian Penduduk;
 - d. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas;
 - e. Tersedianya sumber dana yang mendukung program dan kegiatan Pengendalian Penduduk.
 - f. Adanya dukungan dana operasional program APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
 - g. Tersedianya fasilitas pelayanan (Puskesmas, Pustu, RS dan Posyandu);
 - h. Tersedianya tenaga medis paramedis dan penyuluh lapangan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. Adanya regulasi tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - j. Terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah
 - k. Terbentuknya kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - l. Tersedianya, Perda/Pergub, Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sebagai payung hukum kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB;
 - m. Adanya Pokja-pokja, forum-forum dan gugus tugas

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target Kinerja Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan terhadap Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				100	18.720.642.625	17.693.374.511	94.51	5.41
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Perangkat Daerah						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran yang Baik						
	Menurunnya Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR)		Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	100	100	7.582.121.863	7.529.054.118	99.30%	0.70

Program Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Capaian Pengendalian Penduduk			1.195.602.550	1.177.076.788	98.45	1.55
Meningkatkan kualitas ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Capaian Pembinaan Kb			1.029.056.300	1.019.633.600	99.08	0.92
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase Capaian Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			2.078.568.800	2.033.041.207	97.81	2.19

g. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
----	------------------------------------	-----------------	-------------------	--------	--------	-----------	---------

					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2		3		4	5	6	7	8	
1	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					18.720.642.625		17.693.374.511		94.51
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran yang Baik			100	7.582.121.863	100	7.529.054.118	100	99.3
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Capaian Kinerja ASN			100	29.965.650.00	100	29.965.650.00	100	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya jumlah dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	Dokumen	1	1.916.900	1	1.916.900	100	100
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	14.999.850	1	14.999.850	100	100	
Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA -	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000	100	100	

	SKPD									
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen DPA	Laporan	1	10.048.900	1	10.048.900	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan, Gaji ASN, Honor Non ASN, Tunjangan ASN, dan Akuntansi Keuangan	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Orang	100	7.799.843.139	87.98	6.862.574.798	12.02	87.98
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Orang	97	6.835.293.139	95	5.934.568.798	100	86.82
	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksannaya Administrasi pelaksanaan ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	2	919.550.000	24	883.006.000.	100	96.02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Tahunan	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Laporan	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	337.639.100	100	337.429.600	100	100
	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas, Batik ASN Dan Non ASN	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	2	229.586.100	1	229.586.100	100	100
	Sub. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya Peningkatan SDM	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai	Dokumen	1	53.053.000	1	53.053.000	100	100
	Sub. Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Peningkatan SDM	Terlaksananya Peningkatan SDM	Orang	4	55.000.000	0	55.000.000	100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	%	100	3.685.619.608	100	3.683.909.147	100	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	1	670.814.594	1	670.536.900	100	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	3	1.117.962.564	100	1.116.730.000	100	99.8

	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	2	78.646.600	1	78.646.600	50	100
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Koordinasi	Laporan	13	1.818.195.850	13	1.817.995.647	100	100
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	645.575.505	100	642.557.512	100	99.5
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi /Internet dan Instalasi Penerangan dan Sumber Daya Air	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	470.005.500	1	466.994.512	100	99.3
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Jasa	Laporan	1	175.570.005	12	175.563.000	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah DP2KB	Jumah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100	1.522.700.000	100	1.511.499.000	100	99.26

			Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Unit	3	1.522.700.000	18	1.060.799.000	100	69.67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	37	396,090,000	37	396,090,000	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	unit	15	321,300,000	10	321,300,000	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	unit	22	74,790,000	8	74,790,000	100	100

		Lainnya	yang dipelihara							
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terlaksananya capaian pengendalian penduduk	Presentase Capaian Pengendalian Penduduk	%	100	1.195.602.550	100	1.177.076.788		98.45
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerinta Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi, Pembentukan Rumah Data dan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Kab/Kota Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100	562.811.800	100	552.272.524	100	98.13
	Sub. Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya kabupaten yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi GDPK	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Laporan	1	345.517.600	3	342.708.494	100	99.19

	Sub. Kegiatan terlaksananya advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPk dan sektor lain	Terlaksananya dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPk dan sektor lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi	Dokumen	1	217.294.200	1	209.564.030	100	96.44
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	100	%	100	632.790.750	100	624.804.264	100	98,74
	Sub.Kegiatan pemetaan program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga	Terlaksananya pemetaan program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program KB	Dokumen	1	238.000.000	13	232.034.454	100	97.49
	Sub. Kegiatan penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga	Terlaksananya profil kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga	Jumlah profil kependudukan dan kb		1	229.051.250	1	297.030.310	100	99.32

	Sub. Kegiatan penyediaan dukungan penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data keluarga	Terlaksananya penyediaan dukungan penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data keluarga	Jumlah Data keluarga yang mutakhir		1	95.739.500	1	95.739.500	100	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Capaian Pembinaan KB	Jumlah Presentase Capaian Pembinaan KB		100	1.029.056.300	100	1.019.633.600	100	99.08
3	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase Peserta yang Mengikuti Advokasi dan KIE KB dan Kespro serta Provider yang memahami Promosi KIE dan KB	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE KB dan Kespro Serta Provider yang Memahami Promosi KIE dan KB		4	541.266.900	100	537.910.200	100	99.38
	Sub. Kegiatan penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan	Terlaksananya penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi,	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE KB dan Kespro Serta Provider yang Memahami Promosi KIE dan KB		77	115.281.850	1	115.103.550	100	99.85

	KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	promosi, dan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal								
	Sub. Kegiatan Penguatan Kerja sama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Terlaksananya Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Advokasi promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE KB dan Kespro Serta Provider yang Memahami Promosi KIE dan KB		14	137.849.150	80	134.670.750	100	97.69
	Sub. Kegiatan pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Terlaksananya pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE KB dan Kespro Serta Provider yang Memahami Promosi KIE dan KB		14	158.297.700	14	158.297.700	100	100

	Sub. Kegiatan pembinaan promosi dan konseling Kesehatan reproduksi	Terlaksananya pembinaan promosi dan konseling Kesehatan reproduksi	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE KB dan Kespro Serta Provider yang Memahami Promosi KIE dan KB		14	129.838.200	14	129.838.200	100	100
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		100	487.789.400	100	481.723.400	100	98.76
	Sub. Kegiatan Pengembangan Strategi Operasioanal dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Peayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		77	299.519.750	77	297.326.710	100	99,27

	Sub.Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		7	188.269.650	120	184.396.690	100	97,94
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		100	2.078.568.800	100	2.033.041.207	100	97.81
4	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Terlaksananya Organisasi/Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi/Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100	1.592.996.400	100	1.563.284.275	100	98.13
	Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan		1	175.796.000	1	160.597.025	100	91.35

			Keluarga							
	Sub. Kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		13	211.744.850	13	211.744.850	100	100
	Sub.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang / Kelompok Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana		500	279.086.000	50	274.386.000		98.32
	Sub.Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Keluarga/ Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		1	156.765.900	250	156.365.900	100	99,74

	Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R)	Terlaksananya peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)		50	48.512.350	300	48.512.350		100
	Sub. Kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi PK	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi PK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		13	55.370.050	20	51.920.050		93.77
	Sub.Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		13	48.539.950	13	44.839.950		92.38

	Sub.Kegiatan Penyediaan sarana penyiapan, pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Penyediaan sarana penyiapan, pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		1	448.547.000	13	448.283.850	100	99.94
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Dokumen/Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		1	485.572.400	100	469.756.932	100	96.74
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		20	88.520.200	40	88.520.200	100	100

	Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah laporan hasil UPPKS yang dibentuk dan aktif		1	81.868.100	20	77.628.100		94.82
	Sub. Kegiatan Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Terlaksananya Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Jumlah hasil laporan sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan dan keuangan keluarga		1	47.201.000		44.425.532		94.12
	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS) dan Pemberdayaan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui BKB, BKL, BKR unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPKPKS) dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga		1	240.682.350		231.882.350		96.34

		Ekonomi Keluarga								
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di kampung kb		1	27.300.750		27.300.750		100

h. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja (Mengapa Tidak Mencapai Target Di Hasilkan).

Sumber daya yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Gubernur dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Perjanjian Kinerja;

- a. Pemberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah provinsi;
- b. Secara bertahap melakukan integrasi system aplikasi yang sudah terbangun di perangkat daerah. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang pelaksanaan e-Government oleh perangkat daerah;
- c. Bekerjasama dengan provider yang dapat menyediakan bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat di distribusikan pada semua perangkat daerah guna meminimalkan penggunaan anggaran belanja bandwidth pada perangkat daerah;
- d. Memaksimalkan pengumpulan data statistik sektoral di perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan guna mendukung Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah;

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam pencapaian sasaran kinerja pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat program yang menunjang sebagai berikut :

❖ **Sasaran Pertama**

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

❖ **Sasaran Kedua**

Terlaksananya Program Pengendalian Pemduduk serta Penyelenggaraan Keluarga

2. Program Pengendalian Penduduk

❖ **Sasaran Ketiga**

Meningkanya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

❖ **Sasaran Keempat**

Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sumber Pendanaan APBD PERUBAHAN TAHUN 2022

No	Program	Jumlah Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.417.415.002
2.	Program Pengendalian Penduduk	1.195.605.550
3.	Program Keluarga Berencana	1.029.056.300
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.078.568.800
JUMLAH		18.720.645.652

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (6-9)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					100	18.720.642.625	17.693.374.511	94.51	5.41
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran yang Baik	100	%	100	100	7.582.121.863	7.529.054.118	99.30%	0.70
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Capaian Kinerja ASN	100	%	100	100	29.965.650.00	29.965.650.00	100%	0
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya jumlah dokumen perangkat daerah	1	Dokumen	1	100	1.916.900	1.916.900	100	0

Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	2	100	14.999.850	14.999.850	100	0
Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD	2	Dokumen	1	100	3.000.000	3.000.000	100	0
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	0	0	10.048.900	10.048.900	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan, Gaji ASN, Honor Non ASN, Tunjangan ASN, dan Akuntansi Keuangan	100	%	100	100	7.799.843.139	6.862.574.798	87.98%	12.02
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Tunjangan ASN	64	Orang	95	100	6.835.293.139	5.934.568.798	86.82%	13.18
Sub.Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksannaya Administrasi pelaksanaan ASN	2	Dokumen	24	100	919.550.000	883.006.000.	96.03	3.97

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Tahunan	1	Laporan	1	100	45.000.000	45.000.000	100	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	100	337.639.100	337.429.600	99.94	0.60
Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas, Batik ASN Dan Non ASN	2	Paket	1	100	229.586.100	229.469.600	99.98	0.02
Sub. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya Peningkatan SDM	1	Dokumen		100	53.053.000	52.960.000	99.86	0.14
Sub. Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Peningkatan SDM	4	Orang	0	100	55.000.000	55.000.000	100	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	3.685.619.608	3.683.909.147	99.95	0.05
Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan	1	Paket	1	100	670.814.594	670.536.900	99.96	0.04

	Kantor	Kantor								
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Bahan Logistik Kantor	3	Paket	6	100	1.117.962.564	1.116.730.000	99.89	0.11
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	1	100	78.646.600	78.646.600	100	0
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	Laporan	13	100	1.818.195.850	1.817.995.647	99.99	0.01
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	645.575.505	642.557.512	99.53	0.47
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi /Internet dan Instalasi Penerangan dan Sumber Daya Air	1	Laporan	1	100	470.005.500	466.994.512	99.36	0.64
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	1	Laporan	12	100	175.570.005	175.563.000	100	0

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah DP2KB	100	%	100	100	1.522.700.000	1.511.499.000	99.26	0.74
	Sub. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	3	Unit	18	100	1.522.700.000	1.060.799.000	69.67	30.33
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terlaksananya Capaian Pengendalian Penduduk	100	%	100	100	1.195.602.550	1.177.076.788	98.45	1.55
	Kegiatan Pemaduan dan Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerinta Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi, Pembentukan Rumah Data dan Penyusunan Profil Kependudukan	100	%	100	100	562.811.800	552.272.524	98.13	1.87
	Sub. Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kabupaten yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi GDPK	1	Laporan	3	100	345.517.600	342.708.494	99.19	0.81

Sub. Kegiatan terlaksananya advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK dan sektor lain	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK dan sektor lain	1	Dokumen		100	217.294.200	209.564.030	96.44	3.56
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	100	%	100	100	632.790.750	624.804.264	98,74	1.26
Sub.Kegiatan pemetaan program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga	Terlaksananya pemetaan program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga	1	Dokumen	13	100	238.000.000	232.034.454	97.49	2.51
Sub. Kegiatan penyusunan profil kependudukan keluarga	Terlaksananya profil kependudukan	1	Dokumen		100	229.051.250	297.030.310	99.32	0.68

	berencana dan Pembangunan keluarga	keluarga berencana dan Pembangunan keluarga								
	Sub. Kegiatan penyediaan dukungan penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data keluarga	Terlaksananya penyediaan dukungan penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data keluarga	1	Dokumen		100	95.739.500	95.739.500	100	0
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Capaian Pembinaan KB	100	%	100	100	1.029.056.300	1.019.633.600	99.08	0.92
3	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase Peserta yang Mengikuti Advokasi dan KIE KB dan Kespro serta Provider yang memahami Promosi KIE dan KB	4	Dokumen	100	100	541.266.900	537.910.200	99.38	0.62

	Sub. Kegiatan penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Terlaksananya penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	77	Laporan	1	100	115.281.850	115.103.550	99.85	0.15
	Sub. Kegiatan Penguatan Kerja sama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Terlaksananya Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Advokasi promosi dan KIE	14	Dokumen	80	100	137.849.150	134.670.750	97.69	2.31

		Peogram KKBPK								
	Sub. Kegiatan pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Terlaksananya pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	14	Dokumen		100	158.297.700	158.297.700	100	0
	Sub. Kegiatan pembinaan promosi dan konseling Kesehatan reproduksi	Terlaksananya pembinaan promosi dan konseling Kesehatan reproduksi	14	Laporan		100	129.838.200	129.838.200	100	0
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	100	%	100	100	487.789.400	481.723.400	98.76	1.24

		KB								
	Sub. Kegiatan Pengembangan Strategi Operasioanal dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Peayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Dokumen	150	100	299.519.750	297.326.710	99,27	0.73
	Sub.Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	7	Oganisasi	120	100	188.269.650	184.396.690	97,94	2.06

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	%	100	100	2.078.568.800	2.033.041.207	97.81	2.19
4	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Organisasi/Doku men Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	100	100	1.592.996.400	1.563.284.275	98.13	1.87
	Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kebijakan Daerahbagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	1	100	175.796.000	160.597.025	91.35	8.65
	Sub. Kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	13	Dokumen		100	211.744.850	744.850.000	100	0

Sub.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	500	Orang	50	100	279.086.000	274.386.000	98.32	1.68
Sub.Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1	Laporan	250	100	156.765.900	156.365.900	99,74	0.26
Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R)	Terlaksananya peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R	50	Organisasi	300	100	48.512.350	48.512.350	100	0
Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan materi IPK	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan materi i Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokumen		100	41.190.000	41.190.000	100	100

	Sub. Kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi PK	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi PK	13	Laporan	20	100	55.370.050	51.920.050	93.77	6.23
	Sub.Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	13	Dokumen	13	100	48.539.950	44.839.950	92.38	7.64
	Sub.Kegiatan Penyediaan sarana penyiapan, pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Penyediaan sarana penyiapan, pengasuhan 1000 HPK	1	Unit	13	100	448.547.000	448.283.850	99.94	0.06
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen/Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui	1	Dokumen	100	100	485.572.400	469.756.932	96.74	3.26

		Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	20	Kelompok	40	100	88.520.200	88.520.200	100	0
	Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	Laporan	20	100	81.868.100	77.628.100	94.82	5.68
	Sub. Kegiatan Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Terlaksananya Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	1	Laporan		100	47.201.000	44.425.532	94.12	5.88
	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	1	Dokumen		100	240.682.350	231.882.350	96.34	3.66

	melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga								
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	Dokumen	100	27.300.750	27.300.750	100	100	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

- Adapaun Tindak Lanjut atas Permasalahan Yang Ada pada Rekomendasi LHE
 1. Untuk Pengukuran Kinerja, Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit masih kosong, dan selanjutnya kami akan mengkoordinasikan ke Inspektorat untuk menanyakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Pengukuran Kinerja.
 2. Untuk Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan masih kurang.
 3. Akan mengkoordinasikan ke Inspektorat untuk menanyakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Pengukuran Kinerja.
 4. Akan mengkoordinasikan ke Inspektorat untuk menanyakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Pengukuran Kinerja
- Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Dalam indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum tercapai dikarenakan faktor SDM aparatur yang masih kurang.
 2. Untuk indikator TFR semakin rendah realisasi yang dicapai, maka semakin berhasil komponen kinerja sasaran dalam menurunkan angka kelahiran total.
 3. Untuk indikator peningkatkan kualitas keluarga hasil yang dicapai semakin tinggi nilai capaian, maka kualitas keluarga yang diukur semakin baik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut, diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* Provinsi Sulawesi Tengah yang diprioritaskan untuk dicapai, serta indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran untuk menilai keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dari target yang harus dicapai.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditargetkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi .

1. Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk pada awal tahun 2017 dan dokumen laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 merupakan laporan Lakip yang ketujuh.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan 1 sasaran strategis, 4 program, 13 kegiatan, 45 Sub Kegiatan dan 2 indikator kinerja utama, 7 indikator kinerja kunci output dan Outcome kegiatan.